

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, dan Laporan Kerja

- Aini, E. N., & Wahyuni, A. A. (2023). Upaya Peningkatan Etika dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. *Journal Law and Government*, 1(2), 116-121.
- Alfa, P (2022) Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*.
- Budhiati, I. (2022). Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1).
- Darma, W. (2022). Peran Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak 2019: Studi Pemungutan Suara Ulang Di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- DKPP, R. (2015). Penyelenggara Pemilu di Dunia. *Jakarta: DKPP RI*.
- Fachriza, M. E., & Wibowo, S. A. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 62-73.
- Hainidar, H., Mappamiring, M., & Rahim, S. (2022). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1114-1127.
- Halawa, A (2022) Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu di Kepulauan Riau. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Haryanti, D (2015) Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*.
- Hermana, M. A., & Jaya, D. P. (2021). Efektivitas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan pelanggaran pada pemilihan umum tahun 2019. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 248-266.

- Illahi, B. K., & Amsari, F. (2022). B Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 55-70.
- Keparlemenan, P. A., RI, B. K. D., Lt, G. N. I., & Subroto, J. J. G. Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik.
- Maryanah, T., Hertanto, H., Budiono, P., & Warganegara, A. (2023). Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(4), 344-350.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Informasi dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil dan Arsitektur*, 16(1), 92-104.
- Pangestu, Aji. "Upaya meminimalisir potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada pemilu serentak 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4.1 (2022)*: 31-44.
- Pramana, S. A. (2022). *Pelanggaran Kode Etik Anggota KPU Kota Palembang Dalam Pemilu Tahun 2019* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163-187.
- Ramadhan, D (2022) Limitasi Etika Pemilu-Evolusi dan Tantangan Penanganan Pelanggaran Etika Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.
- Rosnawati (2022) Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.
- Said, M. (2023). Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 91-100.

- Saleh, S. H. (2022). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Sinar Grafika.
- Saputra, M. E., Kirana, A. C., Danti, R., Lestari, P., Wighuna, F. A., & Utami, B. A. R. (2023). Analisis Potensi Pelanggaran Etika Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 30-34.
- Sardini, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. LP2AB.
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71-83.
- Sugiarto, B., Akbar, A. A. S., Pratiwi, O. C., Nurprojo, I. S., & Perdani, T. (2022). Challenges and problems in the recruitment of ad hoc workers of election management body at the local level: Evidence from Banyumas. *Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 35(2).
- Sukrisman, A (2023) Inovasi Penyelenggara Pemilu Serentak Nasional 2024 yang Kredibel dan Berintegritas. *Jurnal Maladum Ilmu Pemerintahan*.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif.
- Syaefudin, M (2019) Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*.
- Tampi, A. S. (2022). Problematika Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Ad Hoc di Daerah Kepulauan. *JDIH KPU*.
- Teguh Prasetyo, S. H. (2019) *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Nusamedia.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem.

Wibisono, E.A (2022) Pembaharuan Birokrasi Kepemiluan Studi Perbandingan Desain Kelembagaan Dalam Upaya Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu 2014 dan 2019. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18.

Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP.P) Tahun 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 ,Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **Putusan**

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 16-PKE-DKPP/II/2023.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 23-PKE-DKPP/II/2023

